

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AGROWISATA**

(Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo,
Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus)

Skripsi

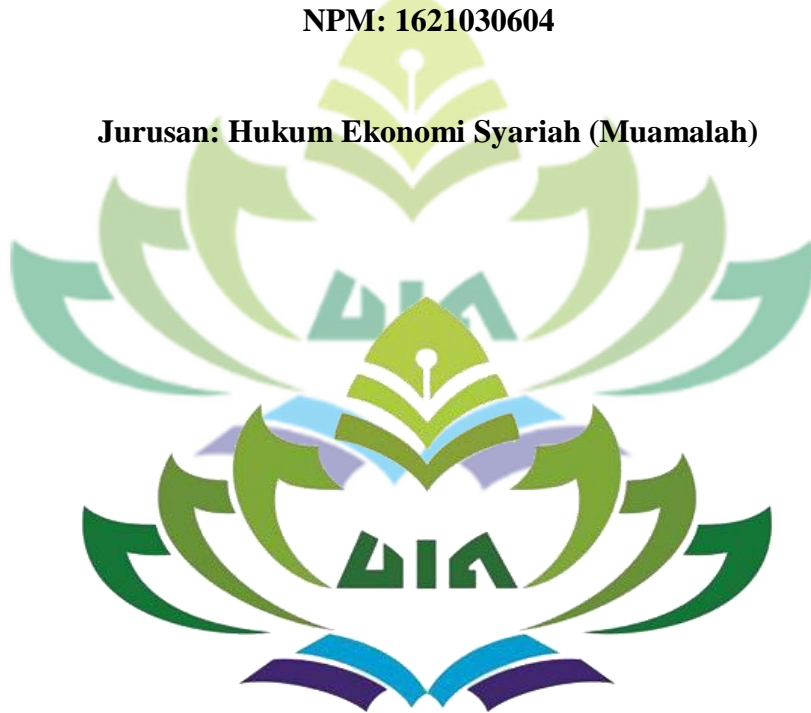
**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah**

Oleh

ARYA RIZAYAN PUTRA

NPM: 1621030604

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AGROWISATA

(Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo,
Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah**

Oleh

ARYA RIZAYAN PUTRA

NPM: 1621030604

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AGROWISATA
(Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo,
Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus).

Islam sebagai agama universal tidak hanya mengatur masalah – masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang kholik , tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum , baik yang berlaku secara individual, maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan dari orang lain , adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya diantaranya yaitu dengan berbisnis. Salah satu bentuk bisnis adalah bisnis agrowisata kebun jambu Kristal, dimana pihak pemilik kebun menyediakan kebunnya kepada pengunjung yang datang menikmati pemandangan dan buahnya. Pengunjung diharuskan membayar tiket masuk terlebih dahulu. Namun dalam hal ini kadang terjadi ketidak pastian baik itu dari pihak pemilik kebun maupun pihak pengunjung, karena dalam prakteknya pemilik kebun menjanjikan adanya buah jambu Kristal yang sudah siap dipetik, tetapi kenyataanya buah tersebut kadang masih muda dan belum siap untuk dipetik atau dikonsumsi. Pengunjung juga kadang membawa pulang buah jambu Kristal yang seharusnya hanya boleh dinikmati didalam kebun saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek bisnis Agrowisata perkebunan jambu kristal di Desa Sumberejo, Kab. Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bisnis tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktik yang ada di agrowisata perkebunan jambu Kristal Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bisnis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel researce*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di desa sumberejo. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara , dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun (*mu'jir*) dan pengunjung (*musta'jir*). objek penelitiannya adalah di Agrowisata kebun jambu Kristal di desa Sumberejo. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan normative hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini adalah praktik akad *ijarah* agrowisata kebun jambu Kristal di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus telah sesuai menurut hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu kedua orang yang berakad sudah *baligh* dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Ketidak jelasan yang terjadi dalam akad baik itu oleh pemilik kebun maupun pengunjung karena kedua belah pihak ingin sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi akad sewa di Agrowisata perkebunan jambu Kristal taman Ria Desa Sumberejo dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum Islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan. Tetapi bonus buah jambu tidak seharusnya diperjanjikan sebagai bagian dari akad, karena jika diperjanjikan termasuk gharar.

Kata kunci : Hukum Islam, Akad sewa, Kebun Jambu Kristal , Desa Sumberejo.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arya Rizayan Putra

NPM : 1621030604

Jurusan/prodi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Agrowisata” (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung 2020

Penulis



Arya Rizayan Putra
NPM: 1621030604



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Lt. Kol. H. Endro Seuratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AGROWISATA (Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal
Taman Ria Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab.
Tanggamus)**

Nama : Arya Rizayan Putra

NPM : 1621030604

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan di Pertahankan Dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.195812071987031003

Pembimbing II

Muslim, S.H.I.M.H.I.
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Lt. Kol. H. Endro Seuratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AGROWISATA** (Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus), Disusun oleh: **ARYA RIZAYAN PUTRA**, NPM: **1621030604**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Telah dimunafasyahkan pada hari/tanggal: **Jum'at, 01 November 2019**.

TIM MUNAQSAH

Ketua : **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

(.....)

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

(.....)

Pembahas Utama : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

(.....)

Pembahas Pendamping I : **Drs. Hendry Iwansyah, M.A.**

(.....)

Pembahas Pendamping II : **Muslim, M.H.I.**

(.....)

Mengetahui

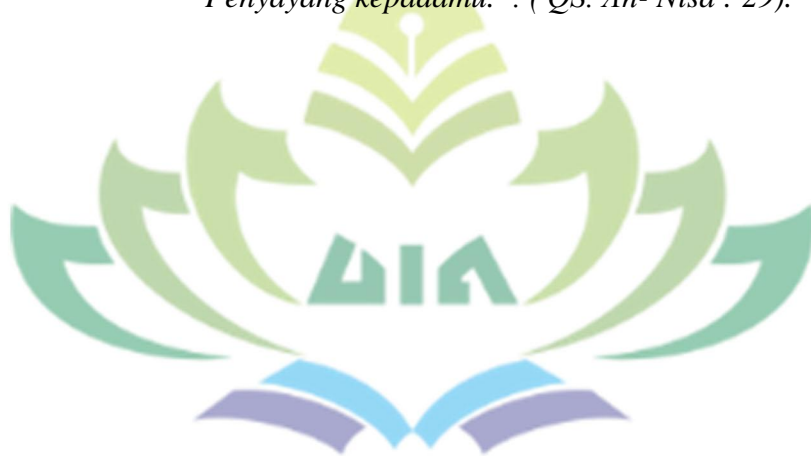
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621022199303100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An- Nisa : 29).¹



¹ Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemah (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), h. 65

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmatnya karya ini dapat di selesaikan. Skripsi ini hamba persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

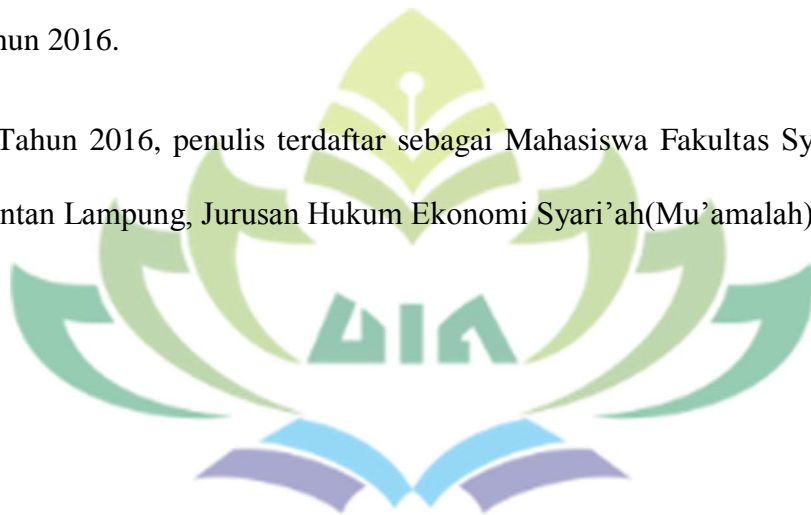
1. Orang tuaku tercinta , ayahanda Rizal Efendi dan ibunda Suryanti yang telah merawatku, membesarkan serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Adikku tersayang, Albira Galang Efendi, Azril Haikal Rafasya serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almameterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Arya Rizayan Putra dilahirkan di gisting pada tanggal 16 Juni 1997, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Rizal Efendi dan Ibu Suryanti orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti bagi penulis.

Pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar SD N 2 Dadapan Kec.Sumberejo, Kab. Tangamus, diselesaikan pada tahun 2010, berlanjut di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Sumberejo selesai pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Sumberejo diselesaikan pada tahun 2016.

Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah(Mu'amalah)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Agrowisata (Studi di perkebunan jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus)” dapat di selesaikan.

Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran Agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahilliyah menuju zaman Islamiah yang penuh dengan IPTEK serta di Ridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa di haturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lamung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henri Iwansyah, M.A., selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I., selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantukan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan;
8. Sahabat-sahabat ku tersayang, Yoga Kurniawan, Sonya Hidayana, Muhamad Nur Alim dan teman-teman sakampung yang telah menemani dalam suka dan duka dan mendukung baik dalam bentuk moril, materil, dan saling berbagi fasilitas demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas kebersamaannya;
9. teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas I, terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung;

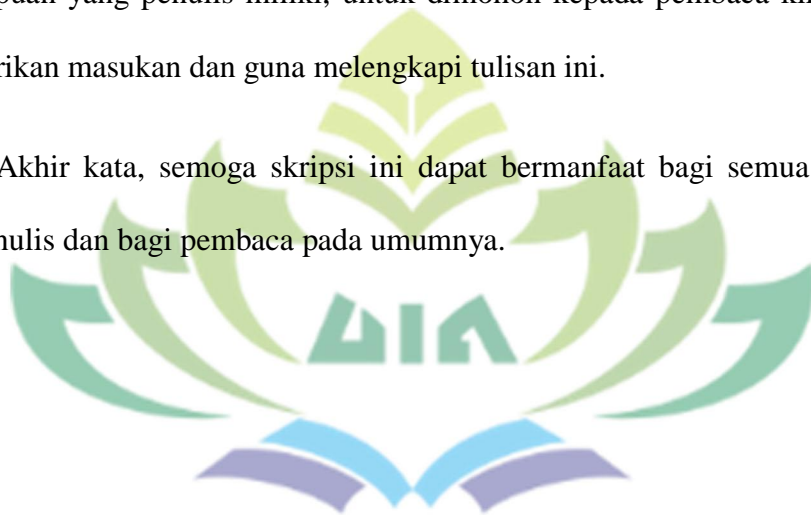
10. Orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis yaitu Dina Pratiwi.

11. Sahabat KKN RM Desa Gunung megang Kelompok 136 UIN Raden Intan Lampung, terima kasih atas dukungannya;

12. Almameter UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung,2020
Penulis

Arya Rizayan Putra
1621030604

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Masalah	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad.....	18
3. Macam-Macam Akad	20
4. Prinsip-Prinsip Akad	21
5. Berakhirnya Akad	22
B. Sewa Menyewa Dalam Islam	
1. Pengertian <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa)	23
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	25
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	28
4. Kewajiban <i>Mu'jir</i> (Orang Yang Menyewakan) dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa)	35
5. Beberapa Hal yang Membatalkan Akad <i>Ijarah</i>	36
C. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	41
2. Dasar Hukum Jual Beli	43
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	45
4. Macam-macam Jual Beli.....	51
5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	54

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	56
D. Tinjauan Pustaka	56
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Agrowisata Perkebunan Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo.....	59
2. Lokasi Agrowisata Perkebunan Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo.	60
B. Praktik Agrowisata Perkebunan Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo.....	61
C. Pendapat Pengunjung Terhadap Praktik Agrowisata Perkebunan Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo	63
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Agrowisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupten tanggamus.....	68
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Agrowisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria Desa Sumberejo	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman terhadap judul, maka dalam kesempatan ini penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa kata/istilah yang ada dalam judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Agrowisata (Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus)**”, selanjutnya penulis tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau ; pandangan ; pendapat (sesudah menyelidiki , mempelajari, dsb); perbuatan meninjau.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini , berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam Maksud Hukum Islam disini adalah Hukum Syariah.²
3. Praktik adalah pelaksanaan Kegiatan secara nyata.³
4. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan . Agrowisata memiliki beragam variasi ,seperti labirin jagung wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional ,*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1529

² Ismail Muhamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999),h. 17

³ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 425

atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi dalam pengembangan industri wisata di seluruh dunia.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik Bisnis Agrowisata yang dilakukan diperkebunan Jambu Kristal taman Ria desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus Lampung, dilihat /ditinjau dari sudut kaca mata Islam.

B . Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik AgroWisata” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Agrowista merupakan bisnis yang lazim dilakukan dalam hal disektor pariwisata, yaitu antara pengunjung dan pemilik lahan agrowisata, namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami bagaimana transaksi yang ada didalamnya menurut syariat Islam.
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik agrowisata.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi tersebut belum ada yang membahas. Khususnya di lingkungan fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai “ Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktek Agrowisata (Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung)”.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata> di akses pada hari rabu tgl 25 september 2019 pukul 09:33 WIB.

- b. Data yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis , yaitu Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya.⁵ Sesuai deskripsi di atas, yang di maksud dengan Muamalah dalam perspektif Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.

Oleh karena itu, Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajad kepada yang lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), h. 278

⁶ Rachmad Syafe,I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 16

menukar, keperluan, dalam segala keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup, masing-masing dalam hal jual beli, sewa menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lainnya. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat Dosa dan permusuhan. Bertagwalah kepada ALLAH, Sungguh ALLAH amat berat siksanya”⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakan taqwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.⁸

Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum muamalah.

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif Al-Qur'an, 1971), h. 156.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Qur'an* (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), h. 16

Kebutuhan manusia saat ini tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan manusia saat ini bermacam-macam seperti kebutuhan mendapat pendidikan, kebutuhan mendapat pelayanan kesehatan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hiburan dan lain sebagainya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan, jarak bukanlah masalah, pada zaman modern saat ini perkembangan sarana dan prasarana pada zaman sekarang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana, berkembang pula sektor pariwisata .

Kebutuhan manusia terhadap wisata sebagai bentuk muamalah sangat berdampak positif terhadap masyarakat . Banyaknya aktifitas yang di lakukan oleh manusia, membuat mereka menjadi jenuh. Banyak hal yang di lakukan oleh manusia agar tidak mengalami kejenuhan, salah satunya yaitu dengan hiburan dan biasanya hiburan tersebut diperoleh melalui aktifitas berwisata . Saat ini kecendrungan atau pemenuhan kebutuhan orang untuk melakukan aktifitas wisata sangat tinggi, selain itu pula banyaknya tempat wisata yang ditawarkan.

Dizaman yang makin berkembang, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan membuka lahan usaha perkebunan jambu Kristal Di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung.

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki potensi besar untuk dikembangkannya agrowisata. Pariwisata berbasis pertanian akan memberikan suatu angin segar bagi para petani dan masyarakat umum untuk dapat memperluas sektor pertanian yang selama ini mereka geluti menjadi objek pariwisata bagi para

wisatawan minat khusus. Pembudidayaan dan perluasan peran dari sektor pertanian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani pada khususnya. Hal ini tentu diperlukan berbagai upaya dan kolaborasi dari sektor lain untuk mencapainya dengan memperhatikan asas berkelanjutan dan kerjasama berbagai pihak terkait untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat petani pada khususnya dan pada masyarakat umum.

Dan dalam hal ini, salah satu contohnya yaitu di agrowisata Kebun jambu Kristal Taman Ria yang berada di desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo, apabila pengunjung ingin masuk ke perkebunan jambu Kristal harus membayar tiket masuk sebesar Rp. 5.000 per orangnya, dengan harga yang ditentukan tersebut sudah bisa menikmati secara langsung buah jambu Kristal di kebun jambu Kristal dengan cara memetik sendiri, tanpa biaya tambahan. Namun, jika pengunjung ingin membawa pulang buah jambu Kristal harus ditimbang terlebih dahulu dan membayar lagi dengan harga Rp.10.000 per kilo.

Kebun jambu Kristal adalah kebun yang dikelola Oleh bapak Bardi pemilik dan pengelola agrowiasata yang berada di desa sumberejo tersebut.. luas kebun yang dimiliki oleh pengelola yaitu bapak Bardi seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ ha, dan untuk jumlah pohonnya sendiri sekitar 400 batang. Untuk waktu buka perkebunan atau agrowisata sekitar jam 08.00-16.00 WIB.⁹ Kebanyakan pengunjung datang pada saat hari libur, pada saat hari libur banyak pengunjung yang ingin memasuki kebun jambu Kristal untuk memetik sendiri buah jambu Kristal.

⁹ Badri (Pengelola/ pemilik), Wawancara dengan Penulis, Agrowisata Taman Ria, sumberejo, 23 Februari 2020.

Dalam praktik agrowisata kebun jambu Kristal Taman Ria yang terjadi di desa Sumberejo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus Lampung, pemilik kebun awalnya sudah menjelaskan buah yang ada pada kebunnya sudah matang, namun dalam kenyataanya kebun yang didatangi oleh pengunjung tidak sesuai dengan penjelasan si pemilik kebun. Pihak pengunjung merasa dirugikan karena sudah membayar uang tiket masuk sebelum masuk perkebunan dan tidak ada pengurangan harga tiket masuk jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan kebun maupun jika kebun tidak berbuah. Pemilik atau pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya kebun tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada kebun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di pandang layak untuk di kaji dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Agrowisata “(Studi Kasus di Wisata Kebun Jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus)”.

D. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana praktik agrowisata yang berada di Perkebunan Jambu Kristal Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, dan bagaimana pandangan hukum Islamnya”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus, yaitu:

1. Bagaimana praktik yang ada di Agrowisata perkebunan jambu Kristal taman Ria dilihat dari segi akad dan pelayanannya

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik Agrowisata di perkebunan Jambu Kristal taman Ria Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik yang ada di agrowisata kebun jambu Kristal Taman Ria di Desa Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupten tanggamus.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik yang ada di agrowisata kebun jambu Kristal taman Ria desa Sumberejo..

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan di capai, antara lain:

1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktik yang ada di agrowisata perkebunan jambu Kristal Kecamatan Sumberejo Kabupten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem yang ada di agrowisata perkebunan jambu Kristal.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep dalam bertransaksi yang sesuai dengan fiqh muamalah yang berdasarkan Alqur'an dan Hadist dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ke Islaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, jurusan muamalah pada khususnya selain itu

diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁰

Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang praktik agrowisata yang sesuai dengan fiqh muamalah dengan objek penelitian di perkebunan jambu Kristal taman Ria desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung.

1. Jenis penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. penelitian ini berhubungan dengan sistem praktek agrowisata perkebunan jambu Kristal di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung.

¹⁰ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta : Grasindo,2008),h.2-3.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹¹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap praktek agrowisata perkebunan jambu Kristal di Desa Sumberejo, Kec. Sumberejo, Kab. Tanggamus, Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan praktek agrowisata perkebunan jambu Kristal, serta factor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh Karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung yaitu dari pengunjung agrowisata dan pemilik agrowisata perkebunan jambu Kristal taman Ria.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

¹¹ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h.26

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), h.225

lewat dokumen.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku-buku yang dapat di peroleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di teliti.

4. Populasi

a. Populasi

Populasi atau Universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan semua pengunjung agrowisata perkebunan jambu Kristal.

Dalam hal ini penentuan populasi dalam penelitian ditentukan berdasarkan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah pemilik growisata kebun jambu Kristal dan semua pengunjung agrowisata perkebun jambu Kristal tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam pnelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.¹⁵ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu

¹³ Sugiono, h. 225

¹⁴ Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum S*, (Jakarta: UI Press,2012), h. 172

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 2, 2018), h. 224

dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti wawancarai sejumlah pengunjung agrowisata kebun jambu Kristal dan seseorang yang bertugas sebagai pengawas atau pemilik agrowisata kebun jambu Kristal tersebut.

b. Obsevasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap sistem transaksi yang ada di agrowisata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, mejalah, agenda dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)h.83

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),h.70

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah di serahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁹

b. *Coding*

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.²⁰

c. *Sistemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan

153 ¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), H.

²⁰ *Ibid.*, h. 154

pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²¹

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum islam terhadap sistem akad jual beli hasil agrowisata perkebunan jambu Kristal yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²²

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 21

²² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampun, 2015), h. 4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad.

Istilah “ perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut ”akad” dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).¹ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Menurut bahasa ‘*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:²

- a. Mengikat (الرُّبْطُ) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan (عُقْدَةٌ), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (العَهْدُ) sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

¹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syari’ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101

Artinya : “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207]
dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa”.³

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ
الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁴

Istilah *ahdu* dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut paudnya dengan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang di buat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁵

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disayri'atkan. terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yaitu sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁶

³ *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif Al-Qur'an, 1971), h. 59

⁴ *Ibid.*, h. 106.

⁵ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.

Dalam istilah Fiqh secara umum Akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti Wakaf, Talak, dan Sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti Jual Beli, Sewa, Wakalah, dan Gadai. Secara khusus Akad berarti keterkaitan antara Hijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁷ Istilah “Perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut “Akad” dalam hukum Islam. Kata Akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan,” pertemuan Ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek Akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar Akad adalah, “pertemuan Ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.⁸

Adapun menurut Musafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang di lakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama bekeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan atau pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing di

⁷ Syamsul Anwar, Hkum Perjanjian Syri'ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 102-103.

ungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang di sebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut *qaabil*.⁹

2. Rukun dan Syarat Akad.

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak Haq dan Itlizam yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1). *Aqid* ialah orang yang berakat, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakat terkadang memiliki hak (*aqad shahih*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain:

a). Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah Baligh atau Mummayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan Mumayyiz Diini artinya mampu membedakan antara baik

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Rajawali Pers, 2010), h. 68.

dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b). Wilayah, wilayah bisa di artikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2). *Mu'qud alaih* ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang di jamin seseorang dalam akad kafalah.

3). *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau masud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4). *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambar kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang di ucapkan setelah ijab.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, h. 44.

3. Macam-macam Akad

a. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:

1). *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakat. Akad yang sah ini di bagi lagi oleh ulama hanafi'ah dan malikiyah menjadi dua macam yaitu:

a). Akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan untuk memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b). Akad *mawaquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melangsungkan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Dalam kasus seperti ini akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu di izinkan oleh wali anak kecil tersebut.¹¹

c). Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama di bagi membaginya kepada dua macam, yaitu:

1 Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106.

itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

2 Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan) *al-‘ariah* (pinjam-meminjam) dan *al-adi’ah* (barang titipan).

2). Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlakudan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang bathil. Akat yang bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dan sayara’. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas.

4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a). Prinsip Kebebasan Berkontrak.
- b). Prinsip Perjanjian Mengikat.
- c). Prinsip Kesepakatan Bersama.
- d). Prinsip Ibadah.
- e). Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi.
- f). Prinsip Kejujuran (Amanah).

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:¹²

- a). Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b). Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c). Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad akan dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2). Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah.
 - 3). Akad itu tidak di laksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4). Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d). Salah satu pihak berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syaria'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35.

B. Sewa Menyewa Dalam Islam

1. Pengertian *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan “ *Al Ijarah*” berasal dari kata “ *Al-Ajru*” menurut bahasa artinya adalah “*Al-Iwadh*”. Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai ganti dan upah.¹³ Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.¹⁴ Sedangkan menurut istilah, sewa (*al-ijarah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian.¹⁵

Dengan demikian, menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang ditukar lalu ditimbang tidaklah sah, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga dengan menyewa sapi, domba atau onta untuk diambil susunya atau anaknya (jika beranak), tidaklah sah. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat bukan pemilikan barang /benda. Perbedaan hal ini jika anantara hewan tersebut diambil manfaatnya misalnya sapi digunakan untuk membajak sawah, maka sewa menyewa semacamnya hukumnya sah.

Ijarah adalah “ pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajjir*), serta pemilik harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*.”¹⁶

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)., h. 14.

¹⁴ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), Cet X, h, 937.

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.29.

¹⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gustu, 1996), hlm.83.

Dengan demikian *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan di sertai kompensasi tertentu pula.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.¹⁷

Ulama Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *ijarah* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang dipindahkan seperti bekakas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisal dengan istilah *ijarah*.¹⁸

Sedangkan menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menerima barang barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.¹⁹

Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatubenda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.²⁰

¹⁷ Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

¹⁸ Muhamad Zuhaily, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, H.170).

¹⁹ Labib Mz, *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, (Bintang Usaha Jaya, Surabaya 2006)., h. 39.

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)., H.29

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, airnya, dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.

Berdasarkan definisi di atas, bahwa sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerima. Dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas penggunaan manfaat atau benda tersebut, dengan rukun dan syarat syarat tertentu.²¹

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunah dan Al-Ijma'. Dasar hukum dalam Al-Quran adalah:

a). Al-Quran Surat Al Az-Zukhruf Ayat 32, disebutkan

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian

²¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005), h. 178-179.

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf: 32).²²

Ayad di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian di antara mereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari pada sebagian yang lain. Ada yang kaya dan juga ada yang miskin, ada pejabat dan rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan dan pembantu, dengan demikian sebagian mereka yang mampu memerlukan bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan memberikan upah.

b). Dalam Al-Quran Surat Ath-Thalaq, 6, disebutkan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ



Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

²² Depatemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung,: CV. Diponegoro, 2006)., h. 26.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Ath Thalaq: 6).

Mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar dengan emas atau uang.” Lalu dia menjawab, Tidak apa-apa”, (H.R Maliki 1142).²³

c). Landasan *Ijma*,

Semua umat islam telah sepakat mengenai syariatkan *Ijarah*, tak seorangun ulama yang membantah kesepakatan *Ijmain*, Sebagai mana yang telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq, dan atas di syariatkannya sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak di anggap (serius), pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama. Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, para ulama bersepakatan bahwa sewa menyewa diperbolehkan.

Tidak seorang ulama, yang membantah kesepakatan (*Ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur’an, Al-Hadis, dan *Ijma*, maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber panggilan hukum islam yang utama.²⁴,

²³ Al-hasimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiist*, (Bandung, Sinar Baru, 1993), h.406.

²⁴ Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung, Cv Pustaka Setia, 2001), h.123

Berdasarkan beberapa dasar di atas, kiranya dapat di pahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa, dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan yang di maksud syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa. Tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri.

Dengan memperhatikan sejumlah dalil syara' para fuqaha telah merumuskan rukun dan syarat-syarat sah nya sewa menyewa, agar sewa menyewa itu dapat terjadi dan dianggap sah menurut syara'.

a). Rukun Sewa Menyewa

Umumnya pada kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *Ijarah* adalah pihak yang menyewa (*muasta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan qabul (*siqah*), manfaat di sewakan dan upah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KEHS) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang di *ijarahkan*
- 4) Akad

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- 1). Sighat *ijarah* yaitu ijab dan qabul berupaya pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- 2). Pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/ atau pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3). Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - a). Manfaat barang dan sewa: atau
 - b). Manfaat jasa dan upah.²⁵

Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah

²⁵ Wahbah al- Zulaيلي, *al-fiqh al-islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), V/458

pihak cakap bertindak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai sebuah transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Jumhur ulama' berpendapat: "adapun sewa menyewa adalah ijab dan Kabul seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termaksud hakekat, dan hakekat akad sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenaran (sahnya) sewa menyewa, sedangkan hal-hal yang menyebabkan sewa menyewa itu tergantung, kepadanya seperti: pelaku akad, dan objek akad maka ia termasuk kedalam untuk terealisirnya hakekat sewa menyewa".²⁶

Jadi menurut Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Imam Hambali rukun sewa menyewa hanya ada dua yaitu ijab dan qabul dan dewasa (balig). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk

²⁶ Dr.Rachmad Syafe'I., *Fiqh Muamalah*, (Bandung:, Cv Pustaka Setia, 2001), h. 125.

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk . Hal ini disebabkan para ulama mempunyai pendapat tersendiri mengenai rukun. Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang termasuk hakekat dan berkaitan langsung dengan keabsahan sesuatu transaksi, dan dalam hal ini adalah aka sewa menyewa itu tersendiri.

Menurut para ulama Malikiyah, Rukun sewa menyewa ada tiga, mereka mengatakan: “Adapun rukun dan sewa menyewa itu ada tiga, yaitu: pelaku akad, yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diadakan yaitu biaya sewa dan manfaat dan sighat, yaitu lafad yang menunjukan atas kepemilikan manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukan adanya pemilikan.”

Menurut ulama Syafi’iyah rukun sewa menyewa ada tiga sebagai berikut:, “rukun sewa menyewa dalam garis besar ada tiga jika diperrinci lagi ada enam, yaitu: pelaku akad, yang meliputi dua unsur, yaitu: orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, dan disebutkan juga “*Mukr*” yaitu pemilik benda, dan “*Muksir*” yaitu orang yang mengambiil manfaat benda itu, objek sewa menyewa, yang meliputi ada dua unsur, biaya dan manfaat, dan sighat yang meliputi unsur *ijab* dan *qabul*.”

Jadi para ulama Hanabillah dengan Ulama Syafi’iyah mereka mengatakan “ rukun sewa menyewa itu seperti jual beli , terdiri dari dari

pelaku akad sewa menyewa, objek sewa menyewa, objek sewa menyewa meliputi ongkos dan manfaat dan sighat meliputi *ijab* dan *qabul*.²⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa: menurut para ulama Hanafi rukun sewa menyewa hanya ada dua yaitu: *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, rukun sewa menyewa ada tiga yaitu, pelaku akad, yang diadakan dan *sighat*.

Kemudian pelaku Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang sama dengan para Ulama Hanabilah, bahwa rukun sewa menyewa secara luas ada tiga yaitu, pelaku akad, yang meliputi orang yang menyewakan dan penyewa, objeknya, yaitu meliputi upah dan manfaat, dan sighat. Yang meliputi *ijab* dan *qabul*. Pada intinya mereka para ulama tidak ada perbedaan yang mendasar tentang rukun sewa menyewa.

b). Syarat Sewa Menyewa

Syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal (Waras)

Karena kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*.

Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan

²⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 320

bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²⁸

Dalam hal ini para Ulama berpendapat bahwa berkecakapan dalam *bermuamalah* ini ditentukan dalam hal hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai perbuatan yang sah.²⁹

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan akad maka golongan ulama Syafi'iyah dan hanabillah menambahkan bahwa orang yang berakad haruslah orang yang dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.

2) Ridho Kedua Belah Pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain. Ketentuan ini dapat di lihat dari firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 34.

²⁹ *Ibid.* h. 35

Atinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰ (*An-Nisa*: 2).

3) Objek Sewa Menyewa Haruslah Jelas Manfaatnya

Barang yang disewa itu peril diketahui mutu dan keadaanya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada Mashlahah, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

4) Objek Sewa Menyewa Haruslah Terpenuhi.

Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.³¹

5) Objek Sewa Menyewa Haruslah Barang Yang Halal

Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yaang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.³²

6) Pembayaran (Uang) Haruslah Bernilai dan Jelas.

Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang

³⁰ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung, CV. Diponegoro, 2006). h. 122

³¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h.19.

³² *Ibid*, h. 20

sudah berlaku. Sementara itu Sayid Sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b) Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya.
- c) Objek yang disewakan haruslah diketahui kadar pemenuhannya.
- d) Benda yang disewakan dapat di serahkan.
- e) Kemanfaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.

Apabila persyatan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara". Sebalik jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.

4. Kewajiban *Mu'jir* (Orang Yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)

a. Hak Penyewa Barang

- 1) Memanfaatkan barang yang disewakan.
- 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewakan.
- 3) Mendapat perlindungan hokum terhadap barang yang disewakan.

b. Kewajiban penyewa barang

- 1) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
- 2) Memberi bayaran atau uang sewa terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.

- 3) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).³³
- c. Hak menyewa barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan.
- d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang disewakan.

5. Beberapa Hal yang Membatalkan Akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkankan fasakh. Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.³⁴

a). Terjadinya Cacat Pada Barang Sewaan

Yang Terjadi Pada Tangan Penyewa Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

³³ Khumaiddi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan, 2005). h. 181-182

³⁴ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 173

b). Rusaknya Barang Yang diSewakan

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat di gunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

c). Masa Sewa Menyewa Telah Habis.

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d). Adanya *Uzur*

Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama

sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Apabila keadaan barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai. Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.

Akibat Hukum dari Sewa menyewa adalah Jika sebuah akad sewamenyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.³⁵

Orang yang terjun di dunia perniagaan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sewa menyewa itu sah atau tidak (fasid). Maksudnya, agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tidaknya jauh dari penyimpangan penyimpangan yang merugikan pihak lain. Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan mempelajari seluk beluk sewa menyewa yang

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 322

di syari'atkan oleh Islam. Mereka tidak peduli kalau yang disewakan barang yang dilarang, atau melakukan unsur unsur penipuan.

Yang diperhitungkan, bagaimana dapat meraup keuntungan yang banyak, tidak peduli ada pihak lain yang dirugikan. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar umat Islam yang menekuni dunia usaha perniagaan dapat membedakan mana yang boleh manayang dilarang, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang Subhat. Sewa menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba hamba Nya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan.

Kebutuhan-kebutuhan Primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (*bermuamalah*) dengan sesamanya. Diantara sebab sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala. Yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.

Dengan demikian seseorang melakukan hubungan-hubungan hukum, saling mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan, karena ketika barang itu bukan milik pribadi maka tidak dapat memanfaatkanya, dan jalan sewa merupakan salah satu langkah untuk dapat memperoleh manfaat terhadap barang orang lain dengan perjanjian, dan syarat-syarat tertentu untuk saling menguntungkan. Bentuk *mu'amalah* sewa-

menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenarkannya.

Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa lahan pertanian kepada orang yang menganggurkan lahan pertaniannya dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua orang dapat membeli lahan pertanian, karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan jalan menyewa.

Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatas tenaga dan keterampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan seperti ini, kita mesti menyewa (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Apabila lahan pertanian itu dibiarkan nganggur oleh pemiliknya, maka seolah-olah menelantarkan rahmat yang diberikan Allah kepadanya, untuk itu dengan jalan disewakan kepada orang lain sama juga telah memberikan pertolongan bagi orang yang menyewa.

Berdasarkan sini dapat disimpulkan bahwa disamping *muamalah* jual beli maka *muamalah* sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman jahiliyyah hingga sampai zaman modern seperti saat ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila sewa menyewa ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dianjurkan kepada setiap orang dalam

rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian jual beli, merupakan transaksi yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai akibat hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfa'at barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan kembali uang sewanya (*ujrah*).³⁶

C. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing salah satunya dengan jual beli. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-ijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.³⁷

³⁶ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007). h.35

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.67.

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-ba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu Jafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitive yaitu tukar menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah, bahwa jual beli(*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dari kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁸

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu ialah tukar-menukar barang atau menukar barang dengan uang. Hal ini telah di praktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqih di sebut dengan *ba'I al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah di tinggalkan, di ganti dengan sistem mata uang.

Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai

³⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.101

mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *Sparpart* kendaraan ke Jepang, maka barang yang di impor itu di bayar.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al- Qur'an, As-Sunah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁴⁰

a. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

³⁹ *ibid*

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 22.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah Ayat 275)⁴¹

1). Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS Al-Baqarah ayat 198)⁴²

Berdasarkan dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar ketentuan syara' dan dapat merugikan orang lain.”

1) Dasar Hukum dalam Al-Sunah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Asunah antara lain adalah sebagai berikut

a) Rasulullah SAW. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

⁴¹ Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemah (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), h.47.

⁴² Muhammad Thalib, *Al-Qura'nul Karim Terjemah Tafsiriah* (Solo: CV Qolam Mas, 2012), h. 24.

Artinya : “Rasullulah SAW. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan” (Riwayat Ibnu Majah).⁴³

Sementara legitimasi ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan Mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan di halalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam kontek Indonesia juga ada legitimasi dari kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.⁴⁴

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu:

1. Akad (ijab Kabul),
2. orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), dan
3. *Ma'kud alaih* (objek akad).

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqd*. Secara bahasa kata *al-aqd*, bentuk masdarnya adalah '*aqada* dan jamaknya adalah *al-uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *ensiklopedia hukum islam*, *al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Akad di definisikan sebagai petalia ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan

⁴³ M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktsir*, di terjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktsir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 54.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 23-25.

ikatan) yang terdapat di dalam kaidah fiqih sesuai degan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.⁴⁵

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak-hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.⁴⁶

- 1). Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (*mukalaf*).
- 2). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelikan hartanya (uangnya).
- 3). Barang jualan, yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara', untuk jual dalam ketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4). Shighat (ijab Kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

⁴⁵ Eka Nuraini Rakhmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (29 Desember 2019 pukul 20:15 WIB).

⁴⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104-105.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab Kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu, kebutuhan sehari-hari tidak di syaratkan ijab dan Kabul, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama syari'iyah, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab Kabul, tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan Kabul, seperti membeli sebungkus rokok.⁴⁷

b. Syarat Jual Beli

Menurut imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya Akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan Jualbeli (*syurut al-nafadz*), syarat Sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat Mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini di maksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang di rugikan.⁴⁸

Pertama, syarat terbentuknya Akad (*syuruth al-I'qad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya Akad atau objek transaksi.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70-71.

⁴⁸ Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Jakarta: PT Rajagafindo persada, 2016), h. 25-30.

Sementara mengenai syarat tempat, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan objek ada empat, yaitu:

- 1). Barang di jadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.

Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begiu juga barang yang belum pasti adanya, seperti barang yang masih berada di dalam kandungan induknya.

- 2). Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagai mana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

- 3). Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.

- 4). Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan yang ada di lautan, dan burung yang ada di udara, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruts al-nafads*) ada dua yaitu:

- 1). Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau

pembelian sutau barang. Otoritas ini dapat di wakilkkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

- 2). Barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan dengan orang lain.

Ketiga, syarat ke absahan akad jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan sayarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat yaitu:

- 1). Barang dan harganya harus diketahui (nyata)
- 2). Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- 3). Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham yang sama dianggap tidak sah.
- 4). Tidak adanya syarat yang yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak di kenal dalam *syara'* dan tidak diperkenalkan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Keempat, syarat mengikat dalam jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagai mana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para

pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikanya mengikat para pihak yang melakukan jual beli:

- 1). Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2). Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.

Rahmad syafe'I dalam bukunya yang berjudul *fiqih muamalah* syarat nilai tukar barang (harga barang) yaitu nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqih membedakan antara *Athaman* dan *As-Si'r*.

Arthaman merupakan harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *As-Si'r* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum di jual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama' fiqih berpendapat syarat nilai tukar barang sebagai berikut:⁴⁹

- 1). Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2). Dapat diserahkan pada saat akad.
- 3). Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

⁴⁹ Rahmat Syafei, *FIQIH MUAMALAH*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 124-125.

Adapun bentuk jual beli, apapun media dan transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Di tinjau dari segi hukumnya Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyuddin.⁵⁰ Bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁵¹

- a). Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
- b). Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- c). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat di lihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

⁵¹ *Ibid*, h. 76-77.

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁵²

- 1). Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat- sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *sahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi miliknya pembeli.
- 2). Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil*.
- 3). Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap mal *ghoiru mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya dengan syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jualbeli *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab Kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang karena ijab Kabul sebagian rukun jual beli.

⁵² *Ibid*, h. 77-78.

ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut.⁵³

1. Dilihat dari sisi objek yang di perjual belikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- a). Jual beli *mutaqah* yaitu, merupakan transaksi jual beli yang dimana pertukarannya antara barang dan/ atau jasa dengan uang.
- b). Jual beli *sharf*, merupakan pertukaran antara mata uang dengan mata uang lainnya.
- c). Jual beli *muqayadah*, merupakan pertukaran antara barang satu dengan barang lainya (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

2). Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Jual beli *masawwamah*, merupakan jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang didapatnya.

- b).Jual beli *amanah*, merupakan jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1). Jual beli *murobahah*, yang artinya jual beli tersebut menggunakan sistem keterbukaan yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.

⁵³ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h .174-175.

2). Jual beli *muwadha'ah*, merupakan jual beli di bawah harga modal atau *discount*.

3).Jual beli *tauliyah*, merupakan jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*batil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Di katakana batal yaitu akad yang menuntut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:⁵⁴

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah di anggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bat)il* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad *bat)il* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut di dasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secar *syar'I* dan juga karna pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.

⁵⁴ Syansul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

- d. Akad bathil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak sumula adalah batal dan tidak pernah ada.

Berakhirnya akad berbeda *Fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara mut'aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*, para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhirabila:⁵⁵

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c. Berakhirnys akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad, prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d. Salah satu pihak berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad mengizinkan.

⁵⁵ Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) h. 42.

6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.

Menurut Khumedi Ja'far yang berjudul "hukum perdata islam" manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁵⁶

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rzki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugra Allh SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, Adriansya dengan judul: Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Durian Yang Masih Di Pohon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Banyu Kecamatan Kedurang). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Bengkulu, di lakukan dengan rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi

⁵⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 121-122.

dan Bisnis Islam. Penulis menyimpulkan bahwa jual beli buah di pohon dilakukan oleh masyarakat di Desa Pagar Banyu dilarang dengan ekonomi Islam. jual beli yang masih ditangkai pohon dapat menimbulkan rusak, karena penyakit atau timbanganya berkurang, atau banyak yang jelek. sehingga menimbulkan permasalahan di kemudiam hari setelah pembeli memanen buah durian tersebut. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan adriansya dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan di lakukan.

Kedua, Irin Sahfitri dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Kasus Di Pemancingan Flabamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dengan rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah. Dan Hasil penelitian praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Irin Sahfitri dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan di lakukan.

Ketiga, Sugiarti dengan judul: Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pa'baeng-baeng Makasar), Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Alaudin Makasar, dilakukan dengan rangka mengambil strata 1 program studi Ekonomi Islam,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah secara borongan di Pasar Pa'baeng-baeng Makassar yaitu penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur gharar. Meskipun demikian penelitian yang di lakukan Sugiarti dapat di jadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan di lakukan.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas secara umum jual beli durian yang masih di pohon, jual beli ikan dengan cara memancing, dan jual beli buah secara borongan. Sedangkan dalam objek kajian penulis dalam penelitian ini adalah tentang praktik beragrowisata, dengan sistem tiket.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Mumin bin Ab Ghani dan Eka Nuraini Rakhmawati, 2019, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, (On-Line), tersedia di:
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>
- Al- Zulaili Wahbah, 2002, *al-fiqh al-islami Wa Adillatuh*, Beirut: Darul Fikr Al-Mu’ashirah.
- An-Nabhani Taqyuddin, 1996, *Membangun System Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gustu.
- Anwar Syansul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Ar-Rifa’i M. Nasib, 1999, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, di terjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktasir*, Jilid I Jakarta: Gema Isnaini Press.
- Ascarya, 2015. *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Ashshiddiq Hasbi, dkk. 1971, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasif Al-Qur’an.
- AySyarbini Muhamad, Juz II.
- Chaudhy Sharif Muhamad, 2016, *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip dasar cet-ke 3*. Jakarta : KENCANA
- Departemen Agama RI, 2010, *AL-Quran dan Terjemah*, Ponorogo: CV Penerbit,.
- ER Nur – Al-‘Adalah, 2015, “ Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *ejurnal. Radenintan.ac.id*
- Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*

Hamka, 2003, *Tafsir Al- Qur'an*, Singapura: Pustaka Nasional.

Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Haroen Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Agrowisata>

Ja'far Khumedi, 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.

Karim Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardalis, 2014. *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, cet-ke 13, Jakarta : Bumi Aksara.

Mardani, 2013, *FIQIH Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana..

Mustofa Imam, 2016, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER*, Jakarta:PT Raja Gafindo Persada.

Mz Labib, 2006, *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.

Thalib Muhammad, 2012, *AL-QUR'ANUL KARIM TERJEMAH TAFSIRIAH*, Solo: CV Qolam Mas.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

WJS. Poerwadarminto, 1976, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, , Cet X, h, 937.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* jakarta : Pusat Bahasa.

Qadratilah Taqdir Meity, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Raco J.R., 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo.

Rasyid Sulaiman, 1998. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Ru'fah Sohari, 1979, *Fiqh Muamalah*,, Bogor: PT Raja Grafindo Persada.

Sahari Sohari, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sayyid Ahmad, Al-hasimi,1993, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiist*, Bandung, Sinar Baru.

Soekarno Soejono, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum S*, Jakarta: UI Press.

Suhendi Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susiadi, 2015. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampun.

Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet- ke 2*, Bandung: Alfabeta.

Syah Muhamad Ismail, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.

Syafe'I Rachmad, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.

Tjitrosudibio Subekti, 2001, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*,, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Ya'qub Hamzah, 1992, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, Bandung: CV Diponegoro.